

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu yang Relevan

Pertama, Dalam penelitian Nikmah Isniani, dengan judul “Kedudukan Tugas dan Kewenangan Bawaslu Menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum”. Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa kedudukan, tugas dan kewenangan Bawaslu dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, dalam penelitian tersebut Nikmah mengambil kesimpulan bahwa kedudukannya yang sebelumnya ad hoc menjadi tetap.

Serta Bawaslu mempunyai tugas utama yaitu pencegahan dan penindakan pelanggaran pemilu, Pengawasan pemilu ini dibagi menjadi dua tahapan yaitu tahapan persiapan dan pelaksanaan. Bawaslu juga bertugas untuk melakukan pencegahan terjadinya politik uang. Tugas barunya adalah pengawasan terhadap netralitas ASN, anggota TNI dan anggota Kepolisian RI.

Kedua, Ali Sidik terfokus dalam menganalisa tentang peranan Bawaslu dalam penegakan hukum pemilihan umum dalam penanganan pelanggaran pada Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD di Provinsi Lampung. Dalam hasil penelitiannya mengenai peranan Bawaslu, Ali

menyimpulkan bahwa Bawaslu dalam menangani pelanggaran administrasi, kode etik, dan pidana pemilu belum dapat berjalan secara optimal, serta mendapatkan lemahnya sumber daya manusia (SDM) pengawas pemilu ditingkat Kabupaten/kota dan jajarannya.

Ketiga, Dedy Haryadi dengan judul penelitian Penguatan peran Panwaslu dalam pemilukada (Studi kasus Pemilukada Jembrana) yang menggunakan metode kualitatif dengan hasil penelitiannya adalah Terdapat peran panwaslu yang kurang didukung oleh Undang-undang yang ada sehingga menjadikan panwaslu hanya sebagai lembaga AD HOC yang menghadapi persoalan kompleks semata

Keempat, Ali Abdul Wahid dengan judul Peran BAWASLU pada pelaksanaan pemilihan GUBERNUR LAMPUNG TAHUN 2018 dalam upaya mewujudkan pemilihan yang Demokratis adalah penelitian yang menggunakan metode kualitatif dengan hasil penelitian adalah Adanya peran yang vital dalam penyelenggaraan pemilihan gubernur lampung yang dipengaruhi oleh faktor struktural, substansi, dan faktor kultur/budaya

2.2 Kerangka Teori

Pengawasan dapat dipahami sebagai suatu proses yang memastikan tercapainya tujuan organisasi dan manajemen, yang mengacu pada cara kerja yang terencana sesuai dengan instruksi dan kebijakan yang diberikan. Diuraikan Menurut Ockler dalam Handoko (1999:14)

menjelaskan elemen utama dari proses kontrol, yaitu. Upaya sistematis untuk menetapkan standar implementasi dan sasaran proyek, merancang sistem informasi, memberikan umpan balik, membandingkan operasi aktual dengan standar yang telah ditentukan sebelumnya.

Sarwoto menjelaskan bahwa pekerjaan pengawas adalah untuk memastikan pekerjaan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dan hasil yang diinginkan. Manullang memberikan definisi yaitu proses penentuan pekerjaan dari rencana semula. Pengertian pengendalian yaitu, pengendalian terdiri dari pemeriksaan bahwa seluruh rencana telah diputuskan sesuai dengan petunjuk yang telah digariskan, tujuannya adalah untuk mengungkapkan (mendeteksi) kelemahan dan kesalahan dengan tujuan untuk memperbaikinya dan mencegah terulangnya kembali (Situmorang 1994:20).

Pengendalian adalah suatu cara berpikir dan suatu kegiatan untuk memberikan pengertian dan kesadaran kepada orang atau orang-orang yang disertai suatu tugas yang harus dilaksanakan secara tepat dan benar, dengan menggunakan berbagai sumber daya yang tersedia, agar tidak melakukan kesalahan dan penyimpangan yang mengakibatkan kerugian. Terjadi mampu memimpin organisasi yang relevan untuk institusi atau organisasi (Makmur: 2011:176).

- Jenis-Jenis Pengawasan menurut Makmur (2011:176) dilihat dari sifatnya, pengawasan memiliki tiga jenis pengawasan, yaitu:

- a. Pengawasan Pendahuluan (*Steering Controls*) Inspeksi ini dirancang untuk mengatasi masalah atau penyimpangan dari standar atau tujuan dan memungkinkan adanya koreksi sebelum aktivitas tertentu dilakukan.
 - b. Pengawasan yang dilakukan bersama dengan pelaksanaan kegiatan (*Concurrent controls*). Pemantauan terjadi bersamaan dengan implementasi fungsi (kontrol simultan). Pemeriksaan ini dilakukan selama pengoperasian. Pengendalian jenis ini merupakan suatu proses dimana aspek-aspek tertentu harus dipenuhi sebelum suatu kegiatan dapat dilanjutkan, atau menjadi semacam alat "*Double Check*" yang lebih menjamin penyelesaian suatu kegiatan.
 - c. Pemantauan umpan balik adalah pemantauan yang mengukur hasil dari kegiatan tertentu yang dilakukan. Menurut Handayaniingrat pengendalian adalah suatu proses dimana seorang manajer ingin mengetahui hasil pelaksanaan yang dilakukan oleh bawahannya sesuai dengan rencana, arah, tujuan atau kebijakan yang diberikan. Inti dari jenis pengendalian ini adalah proses harus benar-benar terkendali agar hasil akhirnya sesuai dengan keinginan bersama.
- Maksud dan tujuan pengawasan menurut Handayaniingrat dalam Sopi (2013:17), yaitu:
 - a. Mencegah dan memperbaiki kesalahan, penyimpangan, kelalaian administrasi yang tidak sesuai dengan tugas dan wewenang yang diberikan.

- b. Untuk Memperoleh hasil pelaksanaan pekerjaan secara efektif dan berhasil sesuai dengan rencana yang diberikan.
- Prinsip Pengawasan Handayaniingrat dalam Sopi (2013:99) menyajikan definisi inspeksi, bahwa:
 - a. Pengawasan harus konsisten dengan tujuan organisasi.
 - b. Pengawasan harus objektif, jujur dan mengutamakan kepentingan umum.
 - c. Pengawasan dalam pekerjaan yang berdasarkan kebenaran, bimbingan harus berdasarkan kebenaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - d. Pengawasan harus memastikan sumber daya dan efisiensi kerja.
 - e. Pengawasan harus berdasarkan standar yang objektif, menyeluruh dan akurat.
 - f. Pemantauan harus dilakukan terus menerus.
 - g. Hasil pemantauan harus dapat memberikan saran perbaikan dan perbaikan dalam pelaksanaan, perencanaan dan kebijakan ke depan.
- Proses Pengawasan menurut G.R Terry dalam buku Sukama (1992:116) yang menjelaskan proses pengawasan dibagi menjadi 4 tahapan, yaitu:
 - a. Menetapkan standar atau dasar untuk pemantauan.
 - b. Mengontrol pengawasan
 - c. Membandingkan penerapannya dengan standar untuk menemukan perbedaannya.

- d. Memperbaiki Penyimpangan.
- Tahapan-Tahapan proses pengawasan menurut Maman Ukas (2004:338) menjelaskan bahwa tahapan-tahapan pengawasan, terdiri dari:
 - a. Ukuran mewakili bentuk yang diminta. Standar tersebut bisa nyata, mungkin tidak nyata, umum atau spesifik, tetapi selama masih diyakini hasilnya sesuai dengan yang diharapkan.
 - b. Perbandingan antara hasil aktual dengan hasil ukuran sebelumnya, tinjauan ini perlu dibagikan kepada publik yang dapat melakukan sesuatu untuk hal ini.
 - c. Kegiatan diadakan untuk koreksi, pengukuran dalam pengawasan tidaklah sulit tanpa dikoreksi, jika dalam hal ini diketahui bahwa aktivitas umum tidak akan mengarah pada hasil yang diinginkan.
 - Fungsi Pengawasan menurut Erni dan Saefullah (2005:12) tugas dari pengawasan adalah sebagai berikut:
 - a. Melakukan evaluasi atas keberhasilan dan pencapaian tujuan dan sasaran target sesuai dengan indikator yang ditentukan.
 - b. Mengidentifikasi dan memperbaiki perbedaan yang ditemukan.
 - c. Melakukan berbagai alternatif pemecahan atas masalah yang berkaitan dengan berbagai pencapaian dan tujuan.

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Politik

Partisipasi politik setidaknya memiliki tiga faktor utama yang berpengaruh, diantaranya;

1. Faktor Psikologis

Faktor ini berhubungan dengan individu atau masyarakat terhadap sebuah partai politik. Dapat teridentifikasi melalui lingkungan sekitarnya mulai dari orangtua, ataupun keluarga. Faktor psikologis juga berkaitan dengan ketertarikan terhadap isu dari suatu partai saja.

2. Faktor Rasionalitas

Faktor ini berhubungan dengan keyakinan yang rasional terhadap penilaian dirinya, keluarga, maupun roda perekonomian negara. Jelas faktor ini sangat fundamental karena dapat mempengaruhi partipipasi sampai pilihan politiknya.

3. Faktor Sosiologis

Faktor yang menjangkau segala aspek, misalnya pendidikan, agama, usia, ekonomi, sampai jenis kelamin. Semua aspek ini sangatlah berpengaruh untuk partisipasi politik dalam pencalonan pemimpin atau pejabat negara.⁹

2.2.1 Pendidikan Politik

. Pendidikan politik Menurut Gabriel Almond dalam Mas'oedi (1986), pendidikan politik merupakan bagian dari sosialisasi politik, yang secara khusus membentuk nilai-nilai politik dan menunjukkan bagaimana seharusnya

⁹ Panjaitan, Marojahan JS, *Politik, Hak Manusia, dan Demokrasi*, Bandung: Pustaka Reka Cipta, 2018.

setiap masyarakat berpartisipasi dalam sistem politiknya. Mohammad Nuh yang dikutip oleh Wayan Sohib (2009) mengatakan bahwa pendidikan kewarganegaraan tidak sebatas mengenalkan seseorang pada peran individu dalam berpartisipasi dalam pemerintahan, partai politik dan birokrasi.

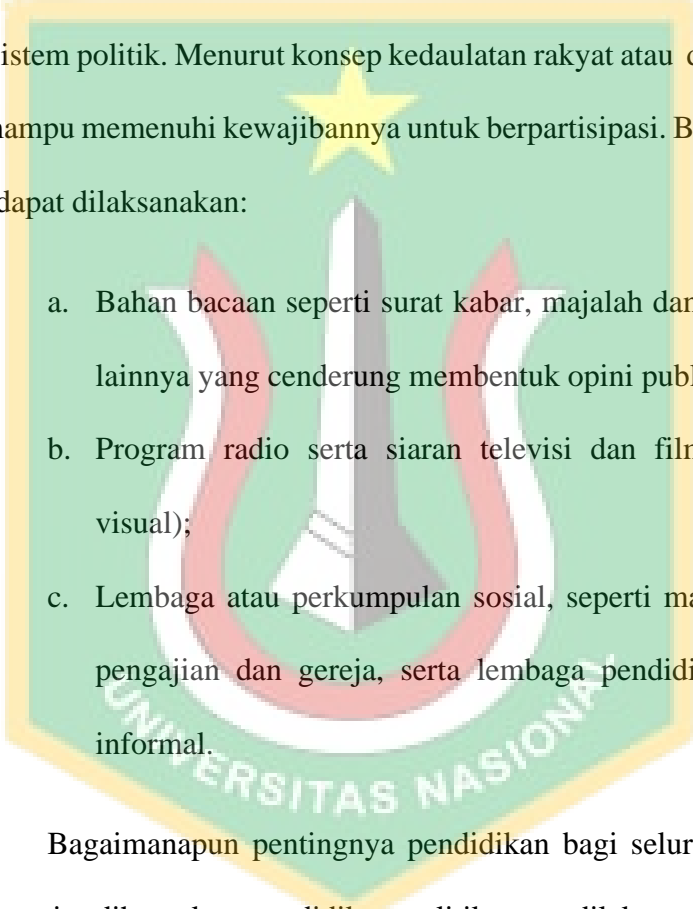
Tetapi pada dasarnya adalah tentang perkembangan suatu proses di mana manusia menjadi dewasa dan diangkat menjadi tanggung jawab individu dan kolektif untuk menyelesaikan masalah-masalah bangsa sesuai dengan kewenangannya, yang memerlukan cara berpikir dan etika dalam berpolitik. Menurut Surono yang dikutip Ramdlang Naning (1982:8) pendidikan politik merupakan tugas masyarakat politik dalam arti mencerdaskan kehidupan politik rakyat, membangkitkan kesadaran warga negara akan kepekaan dan kesadaran akan hak, tugas dan tanggung jawab terhadap bangsa dan negara.

Alfian (1990) mengacu pada pendidikan politik dalam arti kata yang paling luas, yaitu. Sosialisasi Politik merupakan bagian langsung dari kehidupan masyarakat sehari-hari. Suka atau tidak suka, tahu atau tidak, disadari atau tidak, hal tersebut dialami langsung oleh masyarakat, penguasa, ataupun orang biasa bisa mengalami hal tersebut.

Dengan demikian, jika dapat di tarik kesimpulannya, bahwa pendidikan politik dapat diartikan (secara harfiah) sebagai usaha sadar untuk mentransformasikan proses sosialisasi politik bagi suatu masyarakat supaya dapat memahami dan mencermati sepenuhnya terkait nilai-nilai politik yang terkandung dalam suatu sistem politik yang ideal yang akan dibangun

hasilnya. Hasil dari apresiasi ini menciptakan atau menghasilkan sikap dan perilaku politik baru yang dapat mendukung sistem politik ideal, sekaligus dengan terciptanya budaya politik baru.¹⁰

Menurut Kantaprawira (2004), tujuan pendidikan politik adalah untuk memperluas pengetahuan masyarakat agar dapat berpartisipasi secara optimal dalam sistem politik. Menurut konsep kedaulatan rakyat atau demokrasi, rakyat harus mampu memenuhi kewajibannya untuk berpartisipasi. Bentuk pendidikan politik dapat dilaksanakan:

- 
- a. Bahan bacaan seperti surat kabar, majalah dan publikasi massa lainnya yang cenderung membentuk opini publik;
 - b. Program radio serta siaran televisi dan film (media audio-visual);
 - c. Lembaga atau perkumpulan sosial, seperti masjid atau tempat pengajian dan gereja, serta lembaga pendidikan formal atau informal.

Bagaimanapun pentingnya pendidikan bagi seluruh warga negara Indonesia, diharapkan pendidikan politik yang dilaksanakan di Indonesia bersumber dari cita-cita yang bersumber dari kepribadian dan kekayaan intelektual bangsa itu sendiri dan disepakati secara nasional dalam pelestariannya. Negara Kesatuan Republik Indonesia dan untuk mencapai

¹⁰ Millah, N. S., & Dewi, D. A. (2021). SKPP Bawaslu Sebagai Sarana Pendidikan Politik dalam Upaya Meningkatkan Partisipasi Politik Warga Negara. *Jurnal Kewarganegaraan*, V, 2723-2328.

tujuan tersebut, maka tujuan politik negara, yang pada hakekatnya mencerminkan keinginan dan cita-cita rakyat atau rakyat Indonesia.

Pendidikan politik disebut juga (*Political Forming*). Disebut “*Forming*” karena menyangkut niat untuk membentuk seorang politikus, sadar akan posisinya atau kedudukan politiknya dalam masyarakat. Oleh karena itu disebut “*Bidung*” (pendidikan atau pendidikan mandiri) karena istilah tersebut mengacu pada pembentukan diri menjadi seorang politikus dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab. Pendidikan politik pada hakekatnya merupakan bagian dari pendidikan orang dewasa.

Pendidikan semacam itu tidak menekankan pada proses pembinaan individu menjadi intelektual politik yang duduk di menara gading pengetahuan, atau menjadi individu yang kritis dan cerdas yang terisolasi dari masyarakat sekitarnya. Namun lebih menekankan pada hubungan individu dengan individu lain atau individu dan masyarakat dalam konteks sosial dalam konteks politik, hubungannya dengan aspek sosial, ekonomi, budaya antara berbagai perbedaan atau situasi konflik yang disebabkan oleh keberadaan dan Keanekaragaman (kemajuan budaya). (Karton, 1989:13-14).¹¹

Tujuan Pendidikan Kewarganegaraan, salah satu tujuan Pendidikan Kewarganegaraan adalah memahami situasi sosial politik yang

¹¹FUNGSI DAN PERAN PENDIDIKAN POLITIK DALAM KEHIDUPAN BERMASYARAKAT <http://rudyhartono.blogs.uny.ac.id/wp-content/uploads/sites/4151/2017/06/Pendidikan-Politik-Upload.pdf>

kontradiktif, berani membangun kritik konstruktif terhadap keadaan masyarakat yang labil, mengarahkan kegiatan pada proses demokrasi yang sebenarnya dan melawan kepentingan dan ideologi tertentu, terutama yang terkait. untuk keamanan dan kesejahteraan hidup bersama. Perhatikan dan upayakan: Peran manusia setiap individu sebagai warga negara (realisasi diri atau realisasi dimensi sosial), Mengembangkan seluruh keterampilan dan kemampuan (aspek kognitif, pemahaman, sikap kritis, sikap positif, keterampilan politik) agar masyarakat dapat berpartisipasi aktif dalam politik. proses diri sendiri, masyarakat sekitar, bangsa dan negara demi pembangunan.(Kartono, 1989:20).

Pendidikan politik tidak dapat terlaksana tanpa ada tindakan nyata dalam penyelenggaraan di lapangan secara langsung. Bentuk pendidikan yang diterapkan akan menjamin terlaksanakannya pendidikan yang penting bagi negara.

Menurut Kuntomijoyo (1994:58), yakni pendidikan politik yang dilakukan dengan indoktrinasi atau dilakukan secara tidak formal seperti; mimbar bebas, sedangkan yang formal adalah pendidikan yang memobilisasi symbol nasional seperti sejarah, bahasa, serta seni sastra.

Pendidikan politik berarti memiliki tujuan mengatur dan mendidik diri secara individual atau kelompok untuk menjadi dewasa dalam berproses politik serta dapat mengambil suatu keputusan demi menggapai

tujuan politik dengan mempertimbangkan resiko yang akan didapatkan nanti kedepannya.

Setiap warga negara memiliki hak yang sama dalam akses pendidikan politik dan bebas dengan metode apapun, secara mendasar dan alamiah pendidikan politik telah berjalan seiring interaksi sosial dalam masyarakat. Bertransformasi yang mampu menilai mana yang baik dan tidak baik suatu keputusan politik, dan akan semakin baik diiringi dengan kesadaran dalam prosesnya.

Secara historis di Indonesia, masyarakat telah mendapatkan pendidikan politik sebelum kemerdekaan melalui gerakan dan organisasi politik baik dari pribumi ataupun dari kelompok penjajah pada zaman itu.

Dengan demikian, pendidikan politik akan menghasilkan pemahaman aspek politik pada setiap permasalahan. Dan juga sebagai sarana memperkenalkan suatu sistem Negara kepada masyarakat, untuk dapat menentukan reaksi terhadap konflik politik yang terjadi ditengah masyarakat.¹²

Sehingga penerapan politik dilakukan sejak dini kepada setiap generasi yang ada, dengan pemikiran yang sudah matang dan holistic terhadap fenomena politik yang telah atau sedang berlangsung dengan

¹² "Teori dan Konsep dalam Konteks Pendidikan Politik"
<http://repository.ut.ac.id/4009/1/PKNI4423-M1.pdf> diakses pada 20 Januari 2023

tetap menerapkan prinsip dasar yakni demokrasi untuk dasar pola pikir dalam berpartisipasi dengan mendambakan kesejahteraan kehidupan.

Dari sudut ilmu, pendidikan politik selalu menonjolkan sesuatu yang bersifat factual terhadap kebijakan dan peristiwa politik, namun harus melakukan komunikasi yang unik dan menarik supaya maknanya bermanfaat terhadap pencerahan suatu bangsa guna terwujudnya Negara yang kualitas meleak politiknya berkualitas.

2.3 Kerangka Pemikiran

Penelitian yang dilakukan berangkat dari keresahan dan kebingungan dengan adanya program yang diinisiasi oleh bawaslu dalam pendidikan politik kaum muda melalui program Sekolah Kader Pengawas Partisipatif (SKPP). Hal ini menimbulkan pertanyaan besar bagi penulis seberapa berpengaruh program tersebut dan target besar yang bagaimana tingkat partisipasi dan meleak politiknya oleh kaum muda.

Penulis memfokuskan alur yang akan dipakai untuk penelitian ini ialah kewenangan bawaslu depok dalam pendidikan pilitik melalui program SKPP tersebut dengan menggunakan pisau analisis dari konsep teori pendidikan politik dalam pembahasan lebih lanjut nantinya.

Dari teori dan penelitian yang disampaikan diatas maka peneliti dalam hal ini membuat kerangka pemikiran sebagai tahapan analisis;

Gambar 1. Kerangka Pemikiran

